

Romusha dan Organisasi Bentukan Jepang di Malang: Jejak Kolonialisme dan Perkembangan Nasionalisme

Elizabeth Dewi Ekaristiningrum^{1*} dan Arif Pandu Winata¹

¹Universitas Negeri Malang

*elizabeth.dewi2407318@students.um.ac.id

Abstract

This study aims to explore in depth the social, political, and economic dynamics in the Malang region during the Japanese occupation from 1942 to 1945. The main focus is directed toward analyzing Japanese military government policies regarding local administrative structures, including how the Japanese authorities reorganized regional governance systems to support the interests of the Greater East Asia War. Furthermore, the study examines the formation and roles of various Japanese-sponsored socio-political organizations such as PUTERA (Center of People's Power), Jawa Hokokai, Seinendan (Youth Corps), Keibodan (Auxiliary Police), Suishintai (Pioneer Corps), and PETA (Defenders of the Homeland) as instruments of mass mobilization and ideological indoctrination within society. A crucial aspect of this research is the discussion of the romusha forced labor policy, which was implemented extensively in Malang. The impact of this policy not only caused physical and psychological suffering but also led to social disintegration and the decline of the local economy. The study also highlights the remaining historical relics from the Japanese colonial period—such as the Garling Tower, Japanese defensive caves, and the Ching Nan Temple—as tangible evidence of the occupation's legacy in Malang. Employing a descriptive-historical approach, this research seeks not only to reconstruct past events chronologically but also to reveal how the Japanese occupation contributed to the emergence of local nationalism in Malang. The findings are expected to enrich local historiography within the broader context of Indonesia's national history..

Keywords: Nationalism; Japanese Occupation; Malang; Romusha; Socio-Political Organizations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di wilayah Malang selama masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis kebijakan pemerintahan militer Jepang terhadap struktur administrasi lokal, termasuk bagaimana kekuasaan Jepang mereorganisasi sistem pemerintahan daerah untuk mendukung kepentingan perang Asia Timur Raya. Selain itu, penelitian ini menelaah pembentukan dan peran berbagai organisasi sosial-politik bentukan Jepang seperti PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), Jawa Hokokai, Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan pembantu polisi), Suishintai (barisan pelopor), dan PETA (Pembela Tanah Air) dalam rangka mobilisasi massa dan penguatan pengaruh ideologi Jepang di tengah masyarakat. Bagian penting lain dari studi ini adalah pembahasan mengenai praktik kerja paksa romusha yang diterapkan secara masif di Malang. Dampak dari kebijakan romusha tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis masyarakat, tetapi juga

mengakibatkan disintegrasi sosial dan kemunduran ekonomi lokal. Penelitian ini turut mengangkat eksistensi peninggalan sejarah fisik dari masa pendudukan Jepang seperti Menara Garling, gua-gua pertahanan, dan Kuil Ching Nan di Malang sebagai bukti konkret warisan kolonial Jepang yang masih tersisa hingga kini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-historis, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kronologis, tetapi juga mengungkap bagaimana proses pendudukan Jepang berkontribusi terhadap tumbuhnya semangat nasionalisme lokal di Malang. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana historiografi lokal dalam kerangka sejarah nasional Indonesia.

Kata Kunci: Nasionalisme; Pendudukan Jepang; Malang; Romusha; Organisasi Sosial-Politik.

Pendahuluan

Indonesia sebelum dikuasai Jepang secara resmi, Jepang melakukan kegiatan pra kondisi untuk mengetahui keadaan Indonesia yang sesungguhnya saat itu dengan kegiatan mata-mata (Spionase). Jepang mengirim orang-orangnya ke Indonesia ada yang menyamar sebagai pedagang, ahli kehutanan, ahli perikanan dan sebaagai wartawan atau juru potret. Sebagai langkah awal untuk menguasai Asia Tenggara adalah melaksanakan penyerbuan ke kawasan pasifik yakni pangkalan angkatan laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941, kemudian penyerangan selanjutnya menuju kearah selatan sesuai dengan tujuan utama untuk menguasai pusat-pusat minyak yang ada di Asia Tenggara. Penyerangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik tersebut dilakukan oleh dengan alasan bahwa kawasan Asia Tenggara saat itu di kuasai oleh Negara-negara yang menjadi sekutu dari Amerika Serikat, sehingga perlu dilindungi olehnya. (Ishak, 2012)

Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Indonesia dan secara bertahap melakukan perubahan untuk mengembalikan kekuasaan Barat. Karakteristik fisik orang Jepang hampir sama dengan orang Indonesia, dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang. Karena itu, Jepang dapat dengan mudah mengidentifikasi tiga A yang mereka miliki: (1) Asia Timur Jepang; (2) Asia Selatan Jepang; dan (3) Asia Timur Jepang. Semboyan ini telah berhasil mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Jepang dipandang oleh Rakyat Indonesia sebagai penolong mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Akhirnya, Jepang sendiri mengakui bahwa ada dampak negatif yang signifikan yang terutama menimpa rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui, bangsa barat telah lama menjajah Indonesia. Pebuatan semacam ini dilakukan Jepang dengan cara yang metodis. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memberikan bantuan kepada tentara Belanda untuk melatih warga negara Indonesia yang pada akhirnya dapat menangani tugas-tugas pemerintahan yang selama ini mereka kerjakan. Orang-orang di Jepang sendiri memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja sama dengan orang-orang di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan kutipan-kutipan "Asia untuk Asia" seperti yang selama ini diutarakan. (Wulandari et al., 2024)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif historis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis dan faktual.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji dokumen sejarah, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah daerah, serta literatur yang relevan mengenai pendudukan Jepang di Malang. Analisis dilakukan dengan menelaah kronologi pembentukan organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang, dampak kebijakan romusha terhadap masyarakat Malang, serta identifikasi peninggalan fisik dari masa tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), untuk memahami makna, peran, serta pengaruh kebijakan dan organisasi bentukan Jepang terhadap perkembangan nasionalisme lokal di Malang.

Hasil dan Pembahasan

Masuknya Jepang ke Malang

Bulan Mei 1942 disusul dengan pengumuman baru untuk para pejabat Syucokan di Malang-Syiu. Dalam pembagian wilayah Syu (Karesidenan), Jepang tetap melaksanakan susunan wilayah pada jaman Hindia Belanda dengan alat-alat pemerintahannya. Malang-Syiu terbagi menjadi 4 Ken (Kabupaten) yaitu Malang-ken, Pasuruan-Ken, Probolinggo-ken dan Lumajang-ken. Dalam pengumumannya pada bulan Mei 1942, pemerintah Jepang mengangkat R.A.A. Sam menjadi Malang Syiucokan yang merangkap sebagai Kenco (Kepala Kabupaten) dan Syico (Kepala Kotapraja). Usaha pemerintah dalam bidang pergerakan ialah mendirikan gerakan tiga A melalui para pemudanya. Untuk seluruh Malang-Syiu yang berhasil dibentuk adalah Singasari-Gun. Oleh karena tidak mendapat sambutan dari rakyat organisasi ini mati dengan sendirinya.

Organisasi-Organisasi Bentukan Jepang di Malang

1. PUTERA

Pada Maret 1943, sebagai pengganti Gerakan 3A, dibentuk organisasi PUTERA yang dipimpin oleh Empat Serangkai: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur. Mereka berupaya menanamkan nasionalisme dan semangat cinta tanah air kepada rakyat Indonesia agar terus berjuang hingga mencapai kemenangan.

Di Malang-syu, badan persiapan PUTERA dibentuk di bawah kepemimpinan Soenarko S.H. dan berhasil membangun organisasi hingga tingkat ken dan gun. Cabang PUTERA Malang diresmikan oleh Empat Serangkai pada 16 Agustus 1943. Meskipun telah diresmikan di tingkat syu, perkembangan di tingkat ken (kabupaten) dan gun (kawedanan) berjalan lambat, terutama di Pasuruan-ken, Probolinggo-ken, dan Lumajang-ken, yang baru diresmikan pada akhir 1943 atau awal 1944. Pengurus PUTERA Malang-syu diketuai oleh R.P. Soeroso dengan M. Sardjono sebagai wakilnya, sementara kepemimpinan di tingkat gun langsung dipegang oleh gunco (Kepala Kawedanan). (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

2. Jawa Hokokai

Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, Jepang telah membentuk beberapa organisasi sosial lain, seperti Gerakan Tiga A dan Putera. Organisasi ini didirikan pada 8 Januari 1944 oleh Jenderal Kumakici Harada, Panglima Tentara XVI. Kepemimpinan pusat Jawa Hokokai berada di bawah kendali langsung Gunseikan, yang merupakan kepala pemerintahan militer pada masa pendudukan Jepang. (Febriani, 2022)

Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Jawa Hokokai itu mempunyai peraturan keanggotaan yang khusus. Menurut peraturan ini syarat untuk diterima menjadi

anggota adalah minimal berusia 14 tahun, bangsa Indonesia atau Jepang, pegawai negeri, atau anggota organisasi kelompok profesi. (Ardiana et al., 2022)

Jawa Hokokai Malang-syu dilantik pada tanggal 9 maret 1944 dipimpin oleh Minoru Tanaka (Malang syucokan) Malang Kaico (ketua) dan R.P. Soeroso sebagai Fuku Kaico (wakil ketua). Adapun anggota-anggota Jawa Hokokai di Malang ialah:

- a. Malang-syu Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik Malang-syu)
- b. Malang-syu Izi Hokokai (Kebaktian Dokter Malang-syu)
- c. Kakyō so kai (perkumpulan bangsa cina)
- d. Arab jin syido iin kai (perkumpulan bangsa arab)
- e. Konketsu jumin iin kai (perkumpulan bangsa indo)
- f. Fujinkai Hokokai (kebaktian wanita).

Jawa Hokokai memperluas organisasinya ke daerah-daerah tingkat gun dan son seperti yang pernah dilakukan oleh Putera. Bila dibandingkan dengan Putera, Hokokai lebih cepat perkembangannya, Karena organisasi ini langsung di pimpin oleh para kenco pada tingkat ken secara ex-officio dan dibantu oleh para bekas ketua Putera sebagai wakilnya. Dalam tempo lima bulan saja, sejak peresmian di seluruh, Malang-syu anggotanya tercatat sejumlah 250.012. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

3. Organisasi Islam

Pada September 1942, sebuah komite umat Islam didirikan di Malang dengan kegiatan yang terbatas pada peringatan hari-hari besar Islam. Komite ini berfungsi sebagai sarana untuk menarik simpati masyarakat Islam melalui propaganda pada momen-momen keagamaan. Setahun kemudian, pada September 1943, dua organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mendapat izin resmi untuk berdiri setelah susunan pengurusnya disahkan. NU dipimpin oleh K.H. Nachtrowi Tohir dan M.A. Dardiri, sementara Muhammadiyah dipimpin oleh Moh. Bedjo dan Radjab Gani. Kegiatan kedua organisasi ini terbatas pada urusan keagamaan dan penyelenggaraan pelatihan Islam. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

4. Seinendan dan Keibodan

Seinendan, atau korps pemuda, dibentuk oleh Jepang dengan anggota pemuda berusia 14 hingga 22 tahun. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1943 dan terdiri dari sekitar 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan utama pembentukannya adalah mendidik dan melatih pemuda agar mampu menjaga serta mempertahankan tanah air mereka secara mandiri. Namun, di balik itu, Jepang juga memiliki kepentingan lain, yaitu mempersiapkan pemuda Indonesia sebagai tenaga cadangan untuk membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. (Matanari et al., 2024). Latihan yang diberikan pada Organisasi Keibodan adalah penjagaan bahaya udara, penjagaan di pantai laut, pengamanan desa dan penyelidikan terhadap tipu muslihat serta kabar angin yang meluas. Anggotanya terdiri atas para pemuda usia 23 – 25 tahun. (Desiyana et al., 2013)

Pembentukan Keibodan di Malang-syu dipimpin oleh Syico Mr. Soewarso Torto Wijogo sebagai danco, dengan Soeharnoto sebagai fuku soedanco, serta didukung oleh tombohan sebagai pimpinan harian. Setelah persiapan dianggap cukup, pada 29 April 1943, dua badan militer, yaitu Keibodan dan Seinendan, resmi didirikan di Jawa. Kemudian, pada Oktober 1944, dibentuk Seinendan Putri (Yosyi Seinendan), yang beranggotakan pelajar perempuan. Yosyi Seinendan Malang-ken dipimpin oleh R.A.A. Sam sebagai danco dan Ny. Poeger sebagai fuku danco. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

5. Suishintai (Barisan Pelopor)

Suishintai atau lebih dikenal dengan Barisan Pelopor adalah kelompok semi militer pertama yang didirikan oleh kaum nasionalis Jepang dan Indonesia pada tahun yang secara langsung memimpin salah satu organisasi Suishintai. Pada tanggal 1 November 1944, Dewan Penasihat Konferensi Pusat Ketiga didirikan. Jepang kemudian mengangkat Sukarno dan wakilnya, Dr. RP Soeroso. Buntaran Martoatmojo dan Otto Iskandar Dinata menjadi pimpinan Korps Dewa Air. (Nabila et al., 2024)

Suishintai juga merupakan anggota Java Hakokai, dan anggotanya terdiri dari pemuda terpelajar dan tidak terpelajar. Anggota Suishintai Heterogen bertujuan untuk mendorong munculnya semangat solidaritas, ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi. Para anggota muda Suishintai menjalani pelatihan militer hanya dengan menggunakan peralatan dasar seperti tombak bambu dan senjata kayu. Setelah Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 16 Desember 1945, organisasi tersebut berganti nama menjadi Barisan Benteng Republik Indonesia (BBRI). (Nabila et al., 2024)

Suishintai di Malang dibentuk sebagai realisasi dari sidang Cuo Sangiin ke-tiga pada 7 Mei 1944. Sebagai Daitaico Malang ken adalah K.H.Noerjasin, dan Mas Supaat sebagai Fuku Daitaico, dilantik pada tanggal 30 September 1944. Pada bulan Oktober 1944 diresmikan pula Yosyi Syuisintai (Barisan Pelopor Pemuda). Barisan pelopor ini tidak begitu populer, kalau dibandingkan dengan Seinendan. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

6. PETA

Pembela Tanah Air (PETA). Merupakan organisasi berbasis militer yang berperan penting dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembentukan organisasi ini didasari pada saat Belanda yang menyerahkan Indonesia kepada Jepang di tahun 1942. Jepang datang dengan harapan baru, sebagai 'kawan lama' bagi Jepang dijadikan alasan mereka membentuk banyak organisasi baru. Salah satunya, PETA yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mendukung kepentingan nasional milik Jepang. (Okcavia et al., 2022)

Dalam pelatihannya, sejumlah perwira tersebut dibagi menjadi beberapa pangkat dalam struktur ketentaraan PETA. Paling tinggi adalah Daidancho, merupakan Komandan Batalyon yang berasal dari tokoh masyarakat dan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kedua, Chudancho sebagai Komandan Kompi, berasal dari kalangan pekerja tanpa pangkat sebatas guru atau juru tulis. Ketiga, Shodancho yaitu Komandan Peleton, merupakan kalangan pelajar. Keempat, Bundancho adalah Komandan Regu merupakan kalangan pemuda lulusan Sekolah Dasar. Terakhir, Giyuhei yang artinya Prajurit yang juga berasal dari pemuda lulusan Sekolah Dasar (Desiyana et al., 2013)

Pada tanggal 16 Februari 1944, Malang Syico mengumumkan pendaftaran untuk kumbu kyoikutai (korp pendidikan opsir PETA), bagi pemuda yang telah berusia sebanyak- banyaknya 20 tahun dan pernah duduk di kelas tertinggi SMP. Dari hasil pendidikan angkatan pertama di Malang-syu dibentuk 2 Daidan dan setelah itu dibentuk lagi 2 Daidan pada tanggal 10 Agustus 1944, Salah satu dari 5 Daidan di Malang -syu ialah Daidan yang berkedudukan di Gondang Legi (Malang ken) dibawah pimpinan Daidanco Iskandar Soelaiman. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

Tentara Sukarela Pembela Tanah Air yang lebih di kenal dengan nama: "PETA", mendapat cukup sambutan dan mengalami perkembangan yang baik, tetapi sekalipun demikian pemerintah-pendudukan Jepang masih belum merasa puas. Hal ini dapat kita maklumi oleh karena Jepang cukup berada dalam kesulitan menghadapi lawan perangnya,

yaitu sekutu terutama di wilayah Asia Tenggara. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2014)

ROMUSHA DI MALANG

Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) merupakan periode kelam yang meninggalkan luka sejarah mendalam bagi bangsa ini. Salah satu aspek paling menyakitkan dari masa tersebut adalah kebijakan romusha, yaitu pengerahan tenaga kerja paksa untuk mendukung kepentingan militer Jepang dalam Perang Dunia II atau juga bisa dikatakan bahwa Romusha adalah istilah yang merujuk pada tenaga kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II. Para romusha, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia antara 16 hingga 40 tahun, dipaksa bekerja dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan lapangan terbang.

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Malang, romusha berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Artikel ini akan mengulas praktik romusha di Malang, proyek-proyek yang menggunakan tenaga kerja paksa, dampaknya terhadap masyarakat, serta peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu kekejaman masa tersebut.

Malang merupakan salah satu kota strategis di Jawa Timur yang turut menjadi sasaran proyek-proyek militer Jepang. Dua lapangan udara utama, yakni Lanud Abdulrachman Saleh (dulu di kawasan Bugis) dan lapangan udara Sundeng di Sawojajar, dibangun dengan memanfaatkan tenaga kerja romusha. Proyek-proyek ini menunjukkan pentingnya Malang dalam strategi pertahanan militer Jepang di kawasan timur Pulau Jawa.

Tidak hanya untuk proyek lokal, romusha dari Malang juga dikirim ke wilayah lain seperti Tulungagung untuk pembangunan Terowongan Niyama. Pembangunan terowongan ini dimulai pada Februari 1943 dengan membuka hutan dan membangun jalur transportasi untuk kepentingan militer. Ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah, termasuk Malang, dipaksa bekerja dalam kondisi buruk dan tidak manusiawi, banyak di antaranya yang meninggal karena penyakit, kekurangan makanan, atau siksaan.

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ROMUSHA DI MALANG

Eksplorasi dan Krisis Sosial

Kebijakan pengerahan romusha di Malang membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah pendudukan Jepang memaksa ribuan laki-laki usia produktif (sekitar 16 hingga 40 tahun) untuk meninggalkan keluarga mereka demi bekerja di proyek-proyek infrastruktur militer. Kehilangan tenaga kerja produktif ini mengakibatkan sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lokal lumpuh. Banyak ladang dan kebun terbengkalai karena tidak ada yang mengelolanya, menyebabkan penurunan produksi bahan pangan dan bahan baku industri.

Seperti yang dicatat Shigeru Sato: "Pengerahan romusha secara besar-besaran mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi lokal. Lahan-lahan pertanian banyak yang terbengkalai karena kekurangan tenaga kerja, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pangan dan meluasnya kelaparan di berbagai daerah." (Sato, 1994, hlm. 85)

Di sisi lain, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para romusha mengalami ketidakpastian ekonomi. Anak-anak dan perempuan harus mengambil alih peran ekonomi keluarga meskipun sering kali tanpa bekal keterampilan yang memadai. Akibatnya, angka kemiskinan melonjak drastis, memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Malang.

Selain itu, distribusi pangan diatur ketat oleh pemerintah Jepang. Mereka membentuk badan distribusi resmi yang mengatur pengadaan beras, minyak, sabun, dan

kebutuhan pokok lainnya. Namun, karena praktik korupsi dan buruknya manajemen, distribusi ini sangat tidak merata. Di banyak daerah, bahan pokok menjadi barang langka. Kondisi ini mendorong tumbuhnya pasar gelap (black market), di mana kebutuhan sehari-hari dijual dengan harga sangat tinggi, di luar jangkauan masyarakat umum. Kelaparan, gizi buruk, dan meningkatnya angka kematian menjadi realitas pahit yang dialami warga Malang selama masa pendudukan Jepang.

"Pengaturan distribusi bahan pokok yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan inefisiensi, sehingga mendorong berkembangnya ekonomi liar di mana harga barang-barang kebutuhan melonjak berkali lipat." (Shiraishi, 1997, hlm. 312)

Ketegangan Rasial dan Penimbunan Barang

Dalam situasi krisis tersebut, praktik penimbunan barang (hoarding) semakin memperparah keadaan. Sejumlah pedagang, terutama dari etnis Tionghoa, yang saat itu masih memiliki akses jaringan ekonomi yang lebih luas, dilaporkan melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok seperti beras, sabun, minyak goreng, dan rokok. Dengan stok barang yang disimpan untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi, kelangkaan barang di pasaran semakin parah.

Penimbunan ini menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Bumiputera, yang merasa terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan ekonomi. Sentimen anti-Tionghoa pun menguat, diperparah dengan propaganda Jepang yang kerap menggunakan isu-isu rasial untuk memecah belah penduduk Indonesia. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial yang membara di bawah permukaan.

Robert Cribb mencatat: "Krisis ekonomi yang berlangsung selama pendudukan Jepang memperparah sentimen rasial, khususnya terhadap komunitas Tionghoa yang dianggap memiliki akses lebih terhadap barang-barang langka. Tuduhan penimbunan menjadi bahan bakar ketegangan sosial yang meledak pada masa Revolusi." (Cribb, 1991, hlm. 67)

Puncak dari ketegangan ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, khususnya pada tahun 1947, ketika aksi kekerasan terhadap warga Tionghoa di Malang pecah. Serangan terhadap toko-toko dan properti milik etnis Tionghoa mencerminkan akumulasi rasa frustrasi, kesenjangan ekonomi, dan luka sosial yang berakar sejak masa pendudukan Jepang. Konflik ini menjadi salah satu warisan kelam dari kebijakan ekonomi represif dan praktik eksploitasi sosial pada masa tersebut.

Anthony Reid juga menegaskan: "Sentimen anti-Tionghoa yang terakumulasi selama masa kekuasaan Jepang memuncak dalam berbagai aksi kekerasan di Jawa pasca 1945, termasuk di Malang, ketika krisis ekonomi dan keresahan sosial mencapai titik didih." (Reid, 1979, hlm. 142)

Peninggalan Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Kota Malang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), Kota Malang dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan strategis, baik dari sisi militer maupun logistik. Hingga saat ini, sejumlah peninggalan dari masa tersebut masih dapat ditemui, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang penting. Berikut adalah beberapa peninggalan bersejarah dari masa pendudukan Jepang di Kota Malang:

1. Menara Garling (Gardu Seruling)

Menara Garling dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942, di kawasan yang saat ini dikenal sebagai daerah Bugis, Malang. Fungsinya adalah sebagai gardu pengawas sekaligus titik koordinasi latihan militer Jepang. Dari menara ini, tentara Jepang dapat

mengatur pergerakan pasukan dan memantau wilayah sekitar. Selain itu, menara ini berfungsi untuk mengoordinasikan sirene tanda bahaya atau perintah penting, sehingga dinamakan juga "Gardu Seruling." Hingga kini, Menara Garling menjadi salah satu simbol peninggalan Jepang yang mengingatkan kita pada masa-masa sulit tersebut. (Sumber: Tugumalang.id)

2. Gua Jepang di Kelurahan Songgokerto

Di Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, Malang, ditemukan sejumlah gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian serta penyimpanan senjata oleh tentara Jepang. Gua-gua ini memiliki struktur bercabang dan beberapa lorong di antaranya menembus ke balik bukit, menunjukkan perencanaan militer yang cukup kompleks. Lokasi gua-gua ini sengaja dipilih karena medannya yang berbukit, memudahkan untuk perlindungan dari serangan udara sekutu. Keberadaan gua-gua ini menjadi saksi nyata betapa seriusnya Jepang mempertahankan kekuasaannya di kawasan Malang. (Sumber: KOMPAS.com)

3. Gua Jepang di Dusun Wonorejo

Selain di Songgokerto, jejak serupa juga ditemukan di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Batu. Gua Jepang di Wonorejo berukuran sekitar 10 meter persegi dengan tinggi mencapai 2 meter. Meski ukurannya tidak terlalu besar, gua ini memiliki nilai historis yang tinggi. Konon, gua ini digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dan penyimpanan logistik militer. Saat ini, gua tersebut menjadi destinasi wisata sejarah, menarik minat wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat masa-masa pendudukan Jepang di Malang Raya. (Sumber: MalangTimes)

4. Kuil Ching Nan (Ching Nan Jinja)

Pada masa pendudukan, Jepang juga membangun kuil-kuil Shinto sebagai bagian dari upaya penyebaran budaya dan ideologi Jepang di wilayah jajahannya. Salah satu kuil yang pernah berdiri di Malang adalah Kuil Ching Nan atau Ching Nan Jinja. Kuil ini didedikasikan untuk Amaterasu Omikami, dewi matahari dalam ajaran Shinto, yang dianggap sebagai leluhur langsung Kaisar Jepang. Meskipun kini kuil tersebut sudah tidak ada lagi, keberadaannya dahulu mencerminkan bagaimana Jepang tidak hanya melakukan penjajahan fisik, tetapi juga berupaya membangun pengaruh budaya dan spiritual di tanah jajahannya. (Sumber: Wikipedia)

5. Monumen Jepang di Pemakaman Belanda, Sukun

Di kawasan Pemakaman Belanda (Londo) di Sukun, Kota Malang, terdapat sebuah monumen Jepang. Monumen ini dibangun untuk mengenang tentara Jepang yang meninggal selama masa pendudukan di Malang. Tugu ini menyimpan banyak kisah menarik, mulai dari fungsi militernya hingga makna penghormatan terhadap tentara Jepang. Monumen ini menjadi bagian dari warisan sejarah yang jarang diketahui banyak orang, dan menunjukkan bagaimana Jepang juga membangun memorial bagi pasukan mereka sendiri di tanah jajahan. (Sumber: Netralnews.com).

Kesimpulan

Masa pendudukan Jepang di Malang pada tahun 1942–1945 menjadi periode penting yang membentuk lanskap sosial-politik wilayah tersebut. Jepang mempertahankan

sistem administrasi warisan Hindia Belanda dan membentuk berbagai organisasi seperti PUTERA, Jawa Hokokai, Seinendan, Keibodan, serta organisasi berbasis Islam dan militer seperti PETA dan Suishintai. Tujuan utama dari pembentukan organisasi-organisasi ini adalah untuk menggalang dukungan masyarakat setempat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya, sekaligus sebagai bentuk kontrol sosial dan ideologis terhadap rakyat Indonesia. Meskipun sebagian organisasi sempat mengobarkan semangat nasionalisme, tak sedikit yang berperan sebagai alat propaganda kepentingan Jepang.

Namun di balik struktur organisasi yang tampak teratur, penderitaan masyarakat tak dapat disembunyikan. Praktik kerja paksa atau romusha menjadi simbol kekejaman penjajahan Jepang di Malang. Ribuan laki-laki dan perempuan dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi untuk membangun infrastruktur militer seperti lapangan udara dan terowongan. Dampaknya sangat luas—lahan pertanian terbengkalai, ekonomi lokal lumpuh, dan keluarga-keluarga kehilangan tulang punggung ekonomi mereka. Distribusi kebutuhan pokok dikendalikan secara ketat dan penuh korupsi, memicu kelaparan, pasar gelap, serta meroketnya angka kemiskinan dan kematian.

Kondisi krisis ini memperparah ketegangan sosial dan memicu konflik rasial, khususnya terhadap komunitas Tionghoa yang dituduh melakukan penimbunan barang. Sentimen anti-Tionghoa yang dibentuk oleh propaganda Jepang dan ketidakadilan distribusi semakin menyulut konflik pasca-kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa kekerasan yang meledak setelah 1945 menunjukkan bahwa dampak pendudukan Jepang tidak hanya bersifat sementara, tetapi meninggalkan luka sosial yang mendalam dan diwariskan pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah ini secara kritis sebagai upaya membangun masa depan yang lebih adil dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Cribb, Robert. *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945–1949*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1991.
- Reid, Anthony. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.
- Sato, Shigeru. *War, Nationalism and Peasants: Java under the Japanese Occupation, 1942–1945*. St Leonards: Allen & Unwin, 1994.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Tugumalang.id. “Menara Garling Peninggalan Jepang di Malang.”
- KOMPAS.com. “Gua Jepang di Kelurahan Songgokerto.”
- MalangTimes. “Gua Jepang di Dusun Wonorejo.”
- Wikipedia. “Kuil Ching Nan.”
- Netralnews.com. “Monumen Jepang di Pemakaman Belanda Sukun Malang.”
- Ardiana, Kurniawan, P. W., & Ciciria, D. (2022). Tinjauan Historis Peran Organisasi Guru dalam Memperjuangkan Pendidikan di Indonesia Tahun 1912-1945. *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4(1), 1–11.
- Desiyana, L., Syah, I., & Basri, M. (2013). Upaya Pemerintah Militer Jepang Membentuk Karakter Militansi Pejuang Bangsa Indonesia Tahun 1942-1945 *Laxsmi. Urnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 2(1).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. (2014). *100 Tahun Malang*. 120.
- Febriani, A. R. (2022). *Mengenal Jawa Hokokai, Organisasi Buatan Jepang pada Masa*

- Penjajahan. Kompas.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6117516/mengenal-jawa-hokokai-organisasi-buatan-jepang-pada-masa-penjajahan>
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–12.
- Matanari, S. R., Kriston Situmeang, H., & Sinaga, R. (2024). Pembentukan Organisasi Semi Militer pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. 21(1), 241–255. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1528>
- Nabila, P., Harnum, S., & Tanjung, M. F. (2024). Japanese Semi-Military Organizations in Indonesia: From Formation to the. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 4(1), 115–118. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Okcavia, S. C., Rudiyanto, & Suwarno, P. (2022). Pembela Tanah Air (PETA): Bela Negara Sebagai Implementasi Nasionalisme Dalam Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 579–589.
- Wulandari, A. N., Tusaddiah, H., Sari, A. P., Pebrina, Y., & Waruwu, A. (2024). Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(3), 16869–16880.